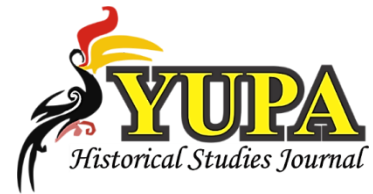


P-ISSN: 2541-6960; E-ISSN: 2549-8754

Yupa: Historical Studies Journal

Vol. 6 No. 2, 2022 (161-180)

<http://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/yupa>



Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965: Soekarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia

Lila Pelita Hati¹, Lestari Dara Cinta Utami Ginting²

¹Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

¹lila@usu.ac.id, ²lestaridaracinta@usu.ac.id

Received	Accepted	Published
19/04/2022	07/12/2022	10/12/2022

Abstract *This study aims to describe the political power possessed by President Soekarno, the TNI-AD (Indonesian Army) and the Indonesian Communist Party during the Guided Democracy period 1959-1965. This study uses historical research methods with heuristics, verification, interpretation and historiography stages. Sources of data used in the form of primary and secondary data such as magazines at that time, archives, books, and journal articles. The theory of political relations and international political conditions during the cold war was used to analyze the political relations between Soekarno, the TNI-AD and the Indonesian Communist Party. The results of this study indicate that the events of the 30 September 1965 Movement were the climax of the political triangle competition of Soekarno, TNI-AD, PKI which was won by the TNI-AD which was assisted by foreigners and ushered Indonesia into a new regime, namely a military-authoritarian regime and the entry of foreign investment.*

Keywords: Soekarno, Indonesian Army, Indonesian Communist Party, Guided Democracy, History 1965

Abstrak *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuasaan politik yang dimiliki oleh presiden Soekarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1965. Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis dengan tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Sumber data digunakan berupa data primer dan sekunder seperti majalah sezaman, arsip, buku, dan artikel jurnal. Teori relasi-politik dan kondisi politik internasional di masa perang dingin digunakan dalam menganalisis relasi politik di antara Soekarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peristiwa 30 September 1965 adalah klimaks dari persaingan segitiga politik Soekarno, TNI-AD, PKI yang dimenangi oleh TNI-AD yang dibantu asing serta mengantarkan Indonesia pada rezim baru; militer-otoriter dan masuknya investasi asing.*

Kata kunci : Soekarno, TNI-AD, Partai Komunis Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Sejarah 1965



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang terjadi tiba-tiba. Kondisi politik Indonesia dan global saat itu juga turut mempengaruhi. Negara-negara yang ada saat itu dihantui bahkan dipaksa untuk memilih antara Blok Timur yang berideologi komunisme atau Blok Barat yang berideologi kapitalisme/liberalisme, telah terjadi *proxy war* yang diprakarsai oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat (Bar-Siman-Tov, 1984). Termasuk juga aksi mereka di Indonesia, dimana saat itu Indonesia menjadi arena perebutan pengaruh antara Blok Timur dan Blok Barat. Kedua blok berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai anggotanya. Sehingga, banyak agen-agen intelijen yang masuk ke Indonesia guna memuluskan rencana tersebut. Kencenderungan Soekarno kepada Blok Timur membuat cemburu Blok Barat pimpinan Amerika Serikat (AS) sehingga AS berupaya menghentikan kedekatan Soekarno-Blok Timur. Tampaknya hal tersebut tidak membuahkan hasil, AS beranggapan Soekarno harus dilengserkan guna mempermudah lancarnya kepentingan ekonomi-politik AS di Indonesia. AS menemukan pihak yang dapat diajak bekerjasama yaitu TNI-AD dan memiliki kepentingan yang sama melawan komunis (Weiner, 2008). AS pun terus membangun hubungan dengan TNI-AD bahkan banyak memberikan banyak pelatihan dan bantuan kepada TNI-AD. Peristiwa 30 September 1965 memang *unfinished business* di Indonesia dan hal itupun dapat terjadi karena buah dari reformasi. Pemaknaan atas peristiwa tersebut masih terus diproduksi dengan berbagai kepentingan (Adam, 2018). Dengan dibukanya dokumen-dokumen rahasia dari *Central Intelligence Agency* (CIA), dan menguatnya sistem demokrasi setelah reformasi, memungkinkan banyak sejarawan dan peneliti telah berani menulis mengenai dan memperkaya khazanah penelitian peristiwa G30S 1965.

Oleh karena itu, penelitian ini satu di antara penafsiran yang berupaya menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa G30S 1965 dengan menganalisis relasi-kekuasaan di antara Presiden Soekarno, TNI-AD dan PKI pada masa demokrasi terpimpin yang dikenal dengan segitiga kekuasaan (Feith, 1964). Peristiwa 30S 1965 dapat dikatakan sebagai klimaks dari hubungan yang tegang dan penuh dinamika di antara Presiden Soekarno, TNI-AD dan PKI akan tetapi bukan akhir dari skenario panjang yang melibatkan pihak asing.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode sejarah yakni, heuristik, verifikasi (kritik), interpretasi, historiografi. Memanfaatkan sumber primer dan sekunder. Peneliti memperhatikan kualitas sumber yang diperoleh, untuk arsip penulis mengambil koleksi dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang juga bisa diakses secara digital, lalu ada majalah forum keadilan, artikel dari jurnal berkualitas dan buku yang telah diakui secara

nasional dan internasional. Louis Gottschalk menjelaskan bahwa sudut pandang dan pandangan berdasarkan pemeriksaan bukti adalah tujuan utama dari metode sejarah yang terus-menerus dipegang sepanjang penelitian (Brewer, 1951). Dalam konteks ini peneliti dibantu dengan teori relasi kekuasaan berpandangan, bahwa segitiga kekuasaan di antara Presiden Soekarno, TNI-AD dan PKI pada masa demokrasi terpimpin serta kondisi politik global saat itu dapat menjadi pijakan sebagai bahan analisis dan selanjutnya untuk mengungkapkan peristiwa 30S 1965. Dengan keterbukaan akses sumber informasi pasca orde baru runtuh memungkinkan peneliti untuk terus mengkaji dan menemukan fakta-fakta sejarah baru terkait peristiwa kontroversial tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran TNI-AD dalam mewujudkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

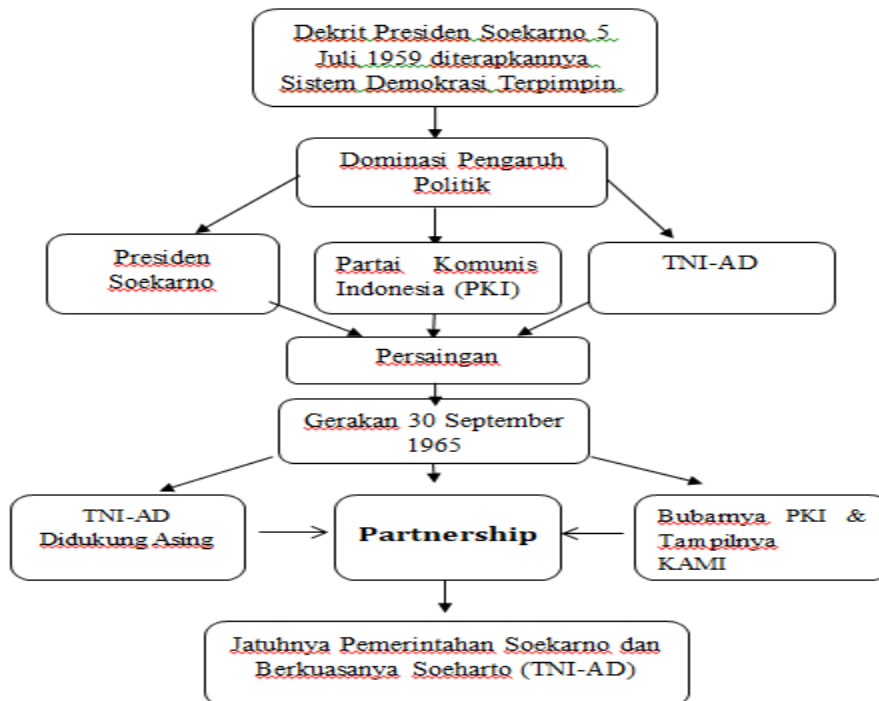
Diterapkannya sistem demokrasi liberal (parlementer) telah memberikan ruang kontrol pemerintahan berada di tangan partai yang berkuasa, persaingan antar partai untuk mendapatkan kekuasaan melalui para pemimpin mereka dilakukan di parlemen. Akibat aksi-aksi dan intrik politik mereka, pemerintah jatuh bangun dan terganggunya kinerja. Terhitung telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet periode 1955-1959. Di bawah sistem ini, Soekarno tetap bertindak sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, mereka menjadi kepala negara yang tidak menjalankan kekuasaan.

Tetapi kendali pemerintahan yang sesungguhnya justru berada ditangan perdana menteri, itulah sejatinya sistem demokrasi parlementer. Perdana menteri yang dipilih dan diangkat dari pemimpin partai politik menjadi sumber dari ketidakstabilan dan jatuh banggunya pemerintahan. Ridwan Saidi seorang Budayawan Betawi dan tokoh HMI mencatat bahwa

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dimana secara konstitusional kedudukan tidak lagi menjadi kepala pemerintahan melainkan kepala negara saja, Presiden Soekarno menyatakan kegelisahannya untuk *emoh* menjadi "presiden stempel". Sementara partai-partai besar dan berpengaruh seperti PNI, Masyumi, NU, PSII, PSI, Parkindo, dan Partai Katolik Menyokong UUDS 1950, Presiden jadi kekurangan dukungan politik (Alfian, 2013).

ABRI dan PKI siap membantu Presiden Soekarno untuk merubah sistem demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin, dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikarenakan juga mereka mendapatkan keuntungan akan hal itu. Masa awal demokrasi parlementer, Presiden Soekarno tidak melakukan banyak hal, sementara Wakil Presiden M.Hatta menjalin hubungan yang harmonis dengan kelompok tentara, terutama dengan T.B. Simatupang dan Abdul Haris Nasution yang menjadi para pemimpin tentara dan memainkan peranan penting dalam mengatasi Peristiwa Madiun 1948 (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1999). Selanjutnya, kelompok militer telah diakui sebagai kekuatan politik-golongan fungsional dan

mampu mendudukkan perwakilannya di Dewan Nasional yang diciptakan oleh pemerintah berdasarkan SOB (*Staat Oorlog en Beleg*) atau "Peraturan Negara dalam Keadaan Bahaya dan Perang" pada bulan Juli 1958. SOB menjadi landasan hukum dan legimitasi militer dalam melakukan pergerakan yang lebih luas dalam fungsi-fungsi ekonomi, administrasi, dan politik. Legimitasi tersebut diimplementasikan dalam bentuk doktrin yang dicetuskan pada bulan April 1965. Isinya bahwa militer memiliki peran ganda, yaitu sebagai kekuatan militer dan juga kekuatan sosial (Kadi, 2000).



Gambar 1. Peta Konsep Segitiga Kekuasaan dan Demokrasi Terpimpin

Gambar 1 menjelaskan bahwa munculnya segitiga kekuasaan dimulai teras atmosfernya ketika keluarnya Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang juga membawa Indonesia pada masa rezim Demokrasi Terpimpin. Dan berakhirnya segitiga kekuasaan tersebut dimulai dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan berdampak pada kekalahan PKI dan lengsernya Soekarno sebagai presiden Indonesia.

Persaingan politik antar partai sedang berlangsung karena perbedaan ideologi telah menimbulkan keresahan di kalangan militer dan semakin mencuat pada tahun 1952 (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2019). Selain disebabkan oleh pertarungan elit partai atas kendali pemerintahan, militer terjepit akibat pengetatan anggaran mereka. Hal tersebut menjadi kepentingan bagi militer untuk segera mungkin menstabilkan kondisi pemerintahan. Puncak berbagai peristiwa politik pada 17 Oktober 1952, ketika kelompok perwira mengorganisasi demonstrasi di depan Istana Negara. Saat itu, jalan-jalan di Jakarta telah menjadi arena demonstrasi massa yang ditujukan ke parlemen. Massa yang membawa

berbagai poster menariakkan tuntutan pembubaran parlemen dan segera mungkin diadakannya pemilu.

Periode 1950-1959 adalah ketikan pemerintah menerapkan system demokrasi parlementer dan mempengaruhi kehidupan militer. Intervensi politisi telah terlalu jauh masuk ke dalam internal militer. Akibatnya, mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 dan berdampak pada perpecahan di lingkungan militer saat itu. Selain itu, intervensi tersebut telah mendorong TNI-AD untuk terlibat dalam kegiatan perpolitikan dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955 (Utami, 2018). Berkembangnya pemikiran terdahulu, yaitu tentara adalah penjaga kepentingan nasional dengan tanggung jawab dapat melakukan intervensi bilamana pemerintah dianggap lemah telah terjadi selama periode 1952-1959 dengan konsepsi bahwa TNI-AD merupakan alat negara yang bersifat apolitis (Crouch, 1999).

Sejak naiknya Nasution ke tampuk pimpinan AD pada bulan November 1955, peran politik TNI makin meluas, jika pada tahun 1952 kebijakan Nasution telah membawanya ke dalam oposisi terhadap Presiden Soekarno, sejak November 1955, Nasution cenderung melihat tentara dan presiden sebagai satu persekutuan yang wajar dalam mengemban tanggung jawab kenegaraan. Ironisnya, sikap dan kebijakannya itu justru membawanya ke dalam konflik tajam dengan beberapa bekas pengikutnya yang sebagian telah menjadi penglima daerah.

Sikap Nasution yang berbalik 180 derajat setelah Peristiwa Madiun 17 Oktober 1952, sebagai "lawan" menjadi "kawan" Presiden Soekarno, juga mengecewakan bos intelijen, Zulkifli Lubis, Komandan RPKAD Djaelani, dan beberapa perwira lain. Mereka berencana menyerbu Jakarta untuk menggulingkan Nasution dari kursi KSAD, tahun 1956. Bala bantuan diperoleh dari RPKAD Bandung, Cuma RPKAD bergerak tanpa koordinasi. Penyerangan prematur, Djaelani dan Suwanto, yang membawa pasukan RPKAD, tertangkap. Kemal yang waktu itu komandan resimen di Cirebon diharuskan cuti oleh Panglima Siliwangi, Suprayogi. Kemal bahkan sempat disebut "pengkhianat". Kemal lantas naik darah dan menyuruh Sekretaris Suprayogi mencatat ucapan atasannya itu. "kamu berani bilang saya pengkhianat, kalau nanti saya menyesal ikut berjuang, *then it's your fault*" kata Kemal ketika itu. Ia kemudian tidak tak tahu Peristiwa Cikini, pelemparan granat kepada Presiden Soekarno, yang disebut perbuatan Zulkifli Lubis, beberapa tahun kemudian (Majalah Forum Keadilan, 1996).

Sekalipun demikian, baik tentara yang di pusat dan daerah yang telah kehilangan kesabaran merasa bahwa harus terjun ke dalam gelanggang politik untuk menyelesaikan keadaan. Pada akhirnya tanggal 5 Juli 1959 pukul 17:00 Wib dalam upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno membacakan dekrit yang bersejarah. Manuver politik Presiden Soekarno dan didukung oleh militer (AD) telah mengakhiri era demokrasi parlementer, yang dianggap merugikan secara politik dan pengaruh bagi Presiden Soekarno dan TNI-AD

(Anwar, 2020).

Dominasi Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Dominasi Politik Presiden Soekarno

Demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan berdampak begitu besarnya kekuasaan Presiden Soekarno dan cenderung dianggap otoriter. Negara demokrasi terpimpin adalah negara eksperimental. Menurut Soekarno; "Kalau kita akui bahwa revolusi Indonesia belum selesai, kita harus mengerti bahwa kita harus menghadapi pembaruan terus menerus... coba ini, kalau tidak berhasil, coba yang lain, kalau tidak berhasil, maka yang lain... Revolusi adalah proses yang dinamis (Fakih, 2013). Soekarno menambahkan "Demokrasi Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri, dan oleh karena itu, harus ada demokrasi terpimpin di negeri ini, demokrasi dengan kepemimpinan." (van der Kroef, 1957). Biasanya ditambah dengan pandangan seperti pernyataan yang mendukung beberapa jenis masyarakat kolektivis.

Sejarawan Taufik Abdullah menyatakan posisi dan peran Presiden Soekarno masa Demokrasi Terpimpin sebagai berikut:

Menjamin loyalitas militer, menjaga dukungan politik PKI, dan mencegah akan terjadinya konflik terbuka antara TNI dan PKI adalah tantangan terberat yang dihadapi Presiden Soekarno di masa demokrasi terpimpin. Perlu diketahui, saat itu telah menguatnya kedudukan politik Presiden Soekarno, TNI-AD, dan PKI. Ia (Presiden Soekarno) berhadapan dengan militer dan PKI yang saling berebut pengaruh dan berseberangan. Secara luas, dapat diartikan bahwa sesungguhnya eksperimen politik Nasakom Presiden Soekarno merupakan eksperimen politik yang *absurd* (mustahil) mencoba menyatukan antara kekuatan non-Komunis melawan Komunis. Ini sesungguhnya sangat beresiko, tidak saja bagi Presiden Soekarno tetapi juga masa depan bangsanya. Betapun demikian, pada masanya, Presiden Soekarno ingin menunjukkan yang terkuat dan eksperimen politiknya adalah hal yang masuk akal dan bisa berhasil ditanamkan di Indonesia (Alfian, 2013).

Eksperimen politik Presiden Soekarno mengenai konsepsi Nasakom bukanlah muncul dengan tiba-tiba di saat beliau telah menjadi seorang presiden bahkan Nasakom adalah cita-cita Presiden Soekarno yang dia pikirkan matang-matang sejak usia mudanya.

Rekam jejak Presiden Soekarno sendiri dapat ditelusuri dari berbagai tulisannya yang kemudian dibukukan dengan judul *Di Bawah Bendera Revolusi*. Salah satu gagasan yang kontroversial diutarakan oleh Presiden Soekarno muda adalah angan-angannya untuk bisa menyatukan tiga kekuatan politik besar yang didasari pandangan Islamisme, Nasionalisme, dan Marxisme, yang kelak di eksperimenkan ke dalam politik Nasakom (Alfian, 2013).

Dua kekuatan politik yaitu, TNI-AD dan PKI saling berusaha mendekati dan mempengaruhi presiden disebabkan kewenangan dan kekuasaan Presiden Soekarno sebagai penentu kebijakan-kebijakan politik. Agar salah satunya tidak lebih dominan dari presiden, Presiden Soekarno mengatur keseimbangan kekuatan politik antara TNI dan PKI dan berusaha tetap mengontrolnya dan tetap menjadi faktor penentu (dominan). Adanya

kemungkinan pengambilalihan kekuasaan oleh Angkatan Darat sehingga Presiden Soekarno menjaga hubungan dengan PKI.

Kedudukan Presiden Soekarno sebagai presiden bukan sekedar simbol seperti dimasa Demokrasi Parlementer. Kekuatan politiknya jauh melampaui seorang presiden di masa normal. Presiden Soekarno dapat membubarkan partai politik, sebagaimana dilakukannya kepada Masyumi dan PSI pada tahun 1960, karena dipandang melenceng dari haluan politik Nasakom yang dirancangnya. Makin besarnya kekuatan PKI yang dimungkinkan berkat dukungan Presiden Soekarno, orientasi anti Barat dari rezim itu dan terutama konfrontasi melawan Malaysia beserta cara Presiden Soekarno memerintah seorang diri, telah menimbulkan perlawanan yang keras dari beberapa kelompok militer. Ditambah lagi dengan kekacauan ekonomi yang semakin parah dan sulit diobati, akhirnya pemimpin Angkatan Darat bersama anggota atau simpatisan partai-partai politik terlarang yang anti Presiden Soekarno itu bergabung. Di antara mereka sendiri memang seringkali sudah terjalin hubungan personal.

Yoza Anwar menulis di koran Mahasiswa Indonesia berjudul "Perjuangan KAMI dan Politik Mercusuar", no. 36, Februari 1967 menyatakan bahwa revolusi Presiden Soekarno sebagai berikut: "Tak ada kepastian hukum, sebaliknya revolusi dijadikan sumber segala hukum". Mendukung pernyataan Yoza Anwar tersebut, Francois Raillon mengungkapkan bahwa:

Oleh karena itu, maka revolusi hanyalah sebuah mitos yang mempunyai fungsi mempunyai fungsi menutupi kenyataan-kenyataan pahit. Ia memungkinkan sahnya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dan prinsip-prinsip demokrasi (Raillon, 1989).

Tetapi menurut Jahja Wullur dalam tulisannya di koran Mahasiswa Indonesia no. 32, Januari tahun 1967 berjudul "*Sudah Selesaikah Revolusi*", revolusinya Presiden Soekarno berbeda dengan Revolusi versinya PKI:

Revolusi yang dianut oleh Bung Karno tidaklah sama dengan revolusi menurut PKI. Bagi Presiden Soekarno pada mulanya revolusi hanya merupakan sebuah cara untuk mendramatisir situasi dan supaya dapat tetap berkuasa, bukannya sebagai sebuah konsep perubahan masyarakat (Raillon, 1989).

Guna menyelesaikannya situasi yang belum juga menjadi lebih kondusif dan demi eksistensi hakikat sebuah pemerintahan yang dapat melaksanakan tugas pemerintahannya maka Presiden Soekarno disimbolkan sebagai Pemimpin Besar Revolusi selama periode 1959-1965. Sejalan dengan itu semua sejumlah krisis terjadi seperti krisis politik, ekonomi, kebudayaan dan sosial. Permusuhan di antara kekuatan-kekuatan politik makin menguat dan nyata di tengah slogan untuk menyelesaikan revolusi tersebut. PKI tidak saja bermusuhan dengan TNI-Angkatan Darat, akan tetapi juga dengan kekuatan-kekuatan agamis seperti Islam dan Katolik, bahkan terjadi pertentangan antara PNI dan PKI. Bukan itu

saja, sesama kekuatan Marxis terjadi permusuhan yaitu, PKI dan Partai Murba (Sanusi, 2018). Tindakan-tindakan fisik yang bahkan tidak jarang menjadi tindakan kekerasan yang "saling membunuh" adalah konsekuensi dari permusuhan politik selama periode 1960-1964.

Revolusi tersebut ditutup dengan terlaksana tetapi dengan kekalahan. Revolusi komunis PKI dikutuk, seperti juga halnya revolusi Presiden Soekarno. Keduanya disamaratakan baik revolusi PKI dan Presiden Soekarno walaupun Presiden Soekarno berstatus presiden Republik Indonesia, dan PKI musuh banyak orang Indonesia saat itu.

Budiardjo (2007) menjelaskan perjalanan demokrasi terpimpin dengan kebijakan terjadi penyelewengan dari Pancasila dan UUD 1945, di antaranya:

1. Melalui Penetapan Presiden no.2/1959 dibentuknya MPRS
2. Presiden menunjuk dan mengangkat Anggota MPRS
3. DPR hasil pemilu 1959 dibubarkan presiden
4. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukan dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) akan tetapi bersumber dari pidato presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
5. Jabatan presiden seumur menjadi milik Presiden Soekarno

Menyokong kekuatan demokrasi terpimpin (demokrasi terpimpin sejatinya adalah ide dari Ki Hadjar Dewantara) dibuatlah seperangkat konsep yang disampaikan dalam pidato kenegaraan presiden berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" pada 17 Agustus 1959. Pidato kenegaraan tersebut disahkan oleh DPA sebagai GBHN dengan judul Manifestasi Politik (Manipol) yang kemudian dikaitkan akronim USDEK yakni U (UUD 1945), S (sosialis Indonesia), D (demokrasi terpimpin), E (ekonomi terpimpin), K (kepribadian Indonesia). Selanjutnya, diciptakan konsep yang bertujuan untuk merangkul kekuatan politik besar di Indonesia yakni Nasakom (Nasionalis, Agamis, Komunis).

Dibubarkannya Masyumi maka ada tiga kekuatan politik Indonesia yang tertinggal saat itu yakni, Presiden Soekarno, PKI dan TNI-AD. Menariknya periode 1960-1965, dari ketiga poros politik tersebut, PKI kedudukannya semakin kuat dan dianggap sebuah ancaman, khususnya bagi TNI-AD. Akhirnya, tidak ada gerakan apapun baik dari mahasiswa atau partai politik termasuk juga militer yang bisa koreksi dan kontrol terhadap penyelewengan tersebut untuk mampu mengganggu eksistensi kekuasaan Presiden Soekarno hingga tahun 1965.

Mengapa dalam periode 1960-1965 Presiden Soekarno memiliki posisi sangat

sentral dalam politik Indonesia? Herbert Feith menyatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai pemimpin yang bertipe *solidarity maker*. Dengan kharismanya sebagai pemimpin bangsa, ia hadir sebagai sosok paling penting dalam masa revolusi mempertahankan kemerdekaan, dalam posisinya sebagai presiden (Starner, 2021).

Kekuatan Politik TNI-AD

Ketika Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan oleh Presiden Soekarno, sejumlah perwira Angkatan Darat yang anti-Presiden Soekarno, terutama Divisi Siliwangi, dan menunjukkan simpati mereka terhadap PSI. Para cendekiawan bekas anggota PSI aktif dalam berbagai pertemuan seminar dan *colloquium*, yang dilakukan bersama perwira Angkatan Darat di Jawa Barat. Salah satu tempat utama dari pertukaran pikiran antara para intelektual dan tentara ialah SESKOAD di Bandung. Sejak tahun 1950-an Kolonel Suwanto mulai mengundang para dosen universitas untuk memberi kuliah kepada para perwira (Raillon, 1989).

“Dahulu Bung Karno berseberangan dengan Jenderal Nasution. Hubungan keduanya tidak akrab, bahkan memanas setelah Presiden Soekarno menetapkan Dekrit 5 Juli 1959, sebabnya Nasution skeptis pembubaran Konstituante dan gagasan kembali kepada UUD 1945 akan mengembalikan pula sikap totaliter Soekarno” ungkap Guruh Soekarnoputra (Adnan, 2016). Proses Nasakomisasi di internal TNI-AD adalah yang paling istimewa untuk diperhatikan, sebabnya telah lama TNI-AD sangat tidak sepakat dengan keberadaan komunis (PKI) di Indonesia. Konsep demokrasi terpimpin Presiden Soekarno berusaha mengubah paradigma atau visi TNI-AD, caranya menyisipkan konsep Nasakom dengan tujuan mengimbangi kekuatan TNI-AD. Hal tersebut dapat terjadi, karena begitu besarnya kekuasaan Presiden Soekarno saat itu.

Presiden Soekarno mengatakan terwujudnya persatuan masyarakat Indonesia harus ada juga persatuan dari kekuatan-politik yang saat ini ada di Indonesia yaitu nasionalisme, agama dan komunisme (Lubis & Hasudungan, 2022). Mengimbangi kekuatan militer dalam menghadapi PKI menjadi faktor tersendiri dari adanya penyisipan Nasakom dan merupakan tujuan awal dari Presiden Soekarno. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Elson yang menyatakan bahwa:

Nasakom disebutkan sebagai perpaduan nasionalisme, agama, dan komunisme (menjadi kebijakan buruk dan memperparah sikap anti partai Presiden Soekarno sebelumnya), membuka akses dan kesempatan kepada PKI berkembang adalah cara untuk mengunci kekuatan militer (TNI-AD) yang makin besar dan mengancam Presiden Soekarno (Elson, 2009).

Meskipun Presiden Soekarno seorang pemimpin negara yang dihormati dan diikuti akan tetapi proses penyisipan Nasakom ini mengalami banyak kendala-hambatan. Terjadi

penolakan atas gagasan Nasakom khususnya konsep komunisme yang sejak lama tidak mendapatkan respons positif dari sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk dari TNI-AD. Faktanya, proses penyisipan Nasakom (Nasakomisasi) di internal TNI-AD tidak mendapatkan tempat, sebagian besar pemimpin TNI-AD bersikap oposisi ketika awal dikeluarkannya konsep Nasakom.

Menghadapi segala macam manuver PKI pimpinan TNI-AD tidak lengah. Aksi-aksi PKI di desa dihadapi oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Komando Rayon Militer (Koramil) masing-masing, pada tingkat kesuluruhan dan kecamatan. Usaha PKI untuk menasakomsasikan TNI-AD dengan cara komisarisi versi negara-negara totaliter ditentang penuh oleh TNI-AD (Notosusanto & Saleh, 1989).

Perwira yang loyal terhadap Presiden Soekarno mengikuti konsep Nasakom. Akan tetapi, ada perbedaan yang khas dengan tidak berkenan menyebutnya sebagai Nasakom. Nasasos (Nasionalis, Agama dan Sosialis) mengganti Nasakomisasi sebab komunisme dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Posisi dilematis terjadi pada TNI-AD karena dimasukkannya Nasakom dilain sisi jika merujuk doktrin saptamarga dan falsafah TNI-AD memosisikan Bung Karno menjadi tokoh sentral, sosoknya menjadi tumpuan. Eksistensi komunis di Indonesia tetap ditentang oleh TNI-AD sebabnya tidak sesuai dengan tujuan TNI-AD. Sebagai alat revolusi, sejatinya TNI-AD bersikap netral, tidak secara tegas menerima ataupun menolak Nasakom.

ABRI/AD sering kali dalam posisi yang dilematis karena kebijakan Bung Karno. Contohnya konsep Nasakom memberikan kesempatan PKI masuk disegala aspek kehidupan. ABRI/AD tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi kejadian tersebut. Juga isu komunistofobia yang dihubungkan dengan sikap anasional telah memberi kesempatan PKI melakukan infiltrasi pada semua aspek kehidupan, tidak terkecuali pada ABRI/AD (Sulastomo, 2008).

PKI menguji kekuatannya yang didukung Presiden Soekarno untuk berhadapan dengan TNI-AD, bentuknya yaitu, melancarkan kritik dan tuduhan keras, bahwa TNI-AD tidak serius dalam menyelesaikan pemberontakan PRRI/Permesta. Polemik politik tersebut terjadi akibat gagasan Nasakom pada pertengahan tahun 1960an. Selain itu, PKI juga mengancam kabinet, khususnya Subandrio yang dituduh menghina Tiongkok. Petinggi TNI-AD menganggap bahwa prasangka dan kritik tersebut tidak merujuk pada kebenaran, melainkan upaya untuk merusak stabilitas, terutama adanya kasus nyata kekacauan oleh PKI di berbagai wilayah Indonesia, sesaat setelah kritikan itu dihembuskan. Respons TNI-AD dengan menghentikan dan membekukan berbagai kegiatan PKI berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya yang ada saat itu dan melalui otoritasnya sebagai Penguasa Perang Pusat (Peperpu) dan Penguasa Perang Daerah (Peperda) (Fakih, 2020). Tidak cukup sampai di situ, juga dilakukan pemeriksaan yang disertai penangkapan pemimpin PKI, serta menghentikan media massa PKI terbit dan beredar. Menyikapi tindakan TNI-AD tersebut, Presiden Soekarno memaksa Nasution agar membebaskan pemimpin PKI dan

memperingatkan TNI-AD untuk tidak fobia terhadap PKI. Hingga saat ini TNI mengatakan dengan tegas bahwa tidak akan mengubah keputusan dan pandangan atas peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), walaupun 39 dokumen rahasia Amerika Serikat yang dibuka ke publik mengungkapkan sejumlah fakta baru di antaranya ABRI memberikan bantuan logistik/mempersenjatai ormas untuk menyerang mereka yang diduga PKI (Utama, 2017).

Kekuatan Politik PKI

Demokrasi terpimpin diwarnai dengan keberadaan TNI-AD sebagai kekuatan Hankam dan sosial politik, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai politik yang paling berpengaruh. Penyeimbangan kekuasaan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia, serta Presiden Soekarno sebagai *balancer* (penyeimbang) di antara keduanya adalah inti dari demokrasi terpimpin. Pertentangan antara Presiden Soekarno, TNI-AD dan PKI dalam konteks demokrasi terpimpin menjadi studi menarik untuk melihat kekuasaan presiden pada periode berlakunya UUD 1945 di Indonesia.

Peranan PKI sangat besar dan terus berkembang menjadi kekuatan politik selama era Demokrasi Terpimpin. Sementara Partai Masyumi dan PSI adalah kelompok yang konsisten melawan PKI. Akan tetapi keduanya dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dituduh menjadi pendukung pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi, TNI-AD menjadi kekuatan tersisa dalam menghadapi PKI. Presiden Soekarno menjaga PKI akan tetapi, dia bekerjasama dengan TNI-AD untuk mengendalikan partai politik lainnya. Kemungkinan adanya pengambilalihan kekuasaan oleh Angkatan Darat menjadi alasan besar Presiden Soekarno membutuhkan PKI. Oleh karena itu, tidak bisa dihindarkan lagi persaingan tiga kekuatan-politik, yaitu Soekarno, TNI-AD dan PKI. Keakraban Soekarno dengan PKI sangat diwaspadai oleh tentara karena, menjadi kekuatan pendukung demi terwujudnya Nasakomisasi selama demokrasi terpimpin. Proyek nasakomisasi dimanfaatkan oleh PKI agar mampu masuk lebih dalam ke pemerintahan dan institusi nonstruktural yang strategis.

PKI mengalami peningkatan dalam kekuatan dan pengaruh pada awal pertama 1960-an, masa ketika Presiden Soekarno dipuji oleh rakyat Indonesia dan mendapat perhatian dunia karena pidato-pidato anti imperialisme-nya yang penuh gelora, Soekarno menjadi figur kharismatik. Selama pemerintahan Presiden Soekarno, PKI menjadi partai komunis bukan-pemerintah yang terbesar di dunia, prediksi banyak pihak baik dari luar dan dalam Indonesia, meyakini bahwa masa tersebut akan menjadi dasar kesempatan bagi PKI selanjutnya untuk membentuk Negara Komunis (Mortimer & Santosa, 2011).

Eksperimen politik Nasakom yang dikembangkan Presiden Soekarno, justru pada praktiknya memberi angin kepada kekuatan politik komunis dan meminggirkan kekuatan-kekuatan anti-komunis, terutama kekuatan arus utama politik Islam (Bandyopadhyaya, 1977).

Sebagaimana dicatat Ridwan Saidi (Budayawan Betawi dan tokoh HMI) bahwa Presiden Soekarno sangat membela PKI.

Melihat begitu hebatnya tantangan ulama Islam terhadap komunisme, apalagi di Jakarta dibentuk Front Anti Komunis dan Liga Anti Komunis Republik Indonesia (LAKRI), akhirnya membuat Presiden Soekarno gerah. Sebagai politikus ulung Bung Karno memang pandai membuat stigma. Kepada mereka yang menentang komunis itu dikatakannya sebagai mengidap penyakit ketakutan (*phobia*) pada komunis atau *komunistophobia*. Dalam pelbagai kesempatan, apalagi sesudah Dekrit 5 Juli 1959, Bung Karno selalu menyelipkan dalam pidatonya tentang *komunistophobia*, "Hai dadap, hai Waru, janganlah engkau sekali-sekali mengidap *komunistophobia*, sekali lagi kataku, jangan engkau mengidap *komunistophobia*." Isa Anshary dalam penerbitan terakhir majalah Hikmah, September 1960, membuat tulisan berjudul, "Bukan *komunistophobia*, tetapi keyakinan Islam." (Alfian, 2013).

Pembelaan Presiden Soekarno semacam itu, ditambah kebijakan politiknya yang melarang Masyumi dan PSI pada 1960, benar-benar membuat PKI di atas angin. Berikut penelusuran penulis bagaimana Presiden Soekarno melakukan pembelaan-pembelaan terhadap PKI:

1. Soegiarso Soerojo (dalam Pour, 2010) melukiskan ulang tahun PKI ke 45 tahun 1965:

PKI merayakan ulang tahun ke-45 secara meriah pada tanggal 23 Mei 1965. Mereka kedatangan tamu-tamu dari Partai Komunis Uni Soviet RRC, Korea, Albania, dan Vietnam sebagai sesama komunis. Poster-poster raksasa, patung pemimpin komunis dan spanduk memenuhi Jakarta. Sejumlah jalan utama Ibu Kota Jakarta menampilkan gambar Presiden Soekarno yang besarnya sama dengan tokoh Lenin, DN Aidit, dan Karl Marx. Jakarta berubah *image*, seperti telah menjadi ibu kota negara komunis dengan ditegakkannya ribuan bendera *Palu Arit* sampai ke pelosok kampung. Presiden Soekarno yang berada di Stadion Utama Gelanggang Olahraga Bung Karno menyambut pawai yang me-merah-kan Jakarta dan seluruh Pulau Jawa. Tangan kanan Soekarno memegang tongkat komando, Bung Karno dengan spontan memeluk Aidit, keduanya berangkulan mesra, disambut tepuk tangan ratusan ribu orang, bagaikan meruntuhkan senayan. Soekarno dengan wajah penuh berseri merasakannya, tidak lupa memakai pakaian seragam Panglima Tertinggi, lengkap dengan semua bintang dan pita tanda jasa yang menyatu di dadanya. "Aku, sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Mandataris MPRS, memang merangkul PKI. Sebab, siapa yang bisa membantah bahwa PKI adalah unsur hebat dalam penyelesaian Revolusi Indonesia? PKI telah menjadi telah menjadi semakin kuat. PKI kini beranggotakan tiga juta orang, Pemuda Rakjat tiga juta orang, simpatisannya 20 juta orang. Mengapa PKI sebegitu besarnya? Oleh karena PKI konsisten dengan progresif revolusionernya. Aku berkata, PKI *yo sanak-ku, ya kadang-ku*.

Selain itu, politik PKI juga bergerak di wilayah kebudayaan, dengan menekan

sastrawan-sastrawan yang tidak seialiran dengan mereka.

2. Empat bulan setelah pelukan mesra antara Bung Karno dan Aidit, atau dua minggu sesudah Presiden mengucapkan pidato kenegaraan 17 Agustus 1965 berjudul "Tjapailah Bintang-bintang di Langit", tanggal 30 Agustus massa komunis melakukan demonstrasi besar-besaran. Massa mendatangi Kedutaan Besar Amerika Serikat, menuntut pemutusan hubungan diplomatik serta mengusir pulang Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green. Sesudah itu, massa membanjiri gedung Kedutaan Besar Inggris, di samping Monumen Selamat Datang, di jantung ibu kota Jakarta. Howard Jones menilai sikap Duta Besar Inggris, Andrew Gilchrist kurang bijaksana. Tindakan memamerkan musik bising dari Skotlandia jelas memicu kemarahan para demonstran. Maka terjadilah apa yang kemudian disesalkan oleh semua pihak. Massa menerobos, membakar habis Kedutaan Besar Inggris. Menghadapi demonstrasi brutal semacam itu, Pemerintah Indonesia tidak melakukan pencegahan. Bahkan, Presiden Soekarno diam-diam justru mendukung aksi-aksi massa revolusioner terhadap Inggris dan AS. Sesuatu yang belum masa pendudukan Jepang sering dia ungkapkan dalam kalimat bersayap pembakar semangat, "...Inggris kita linggis, Amerika kita setrika (Jones, 1971).
3. Di tengah suasana revolusioner membakar Jakarta, tanggal 13 September, jika kita hitung maka hari itu 17 hari sebelumnya Peristiwa G30S, Presiden Soekarno memberikan penghargaan prestisius kepada Aidit, Bintang Mahaputera. Penghargaan tersebut dilandasi pertimbangan sangat mengejutkan, "...atas kepahlawanan berikut teladan yang telah dia berikan dalam *political leadership* (Pour, 2010).
4. Ulama Islam terkenal Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang populer dengan sebutan Buya Hamka, "diserang" oleh mereka melalui lembaran kebudayaan "Lentera" surat kabar *Bintang Timur* pimpinan Pramoedya Ananta Toer dan S. Rukiah. Abdullah S.P (Said Patmadji) menulis "Aku Mendakwa Hamka, Plagiat" secara bersambung di surat kabar tersebut dimulai pada 5 Oktober 1962. Novel buah karya Hamka *Tenggelamnya Kapal Van der Wijk* dikritik secara detail, dibongkar, distigmakan sebagai plagiat, meniru buku dari pengarang kenamaan Mesir, Lutfi Al-Manfaluti. Membuktikannya, ditunjukkanlah *idea script* atau gagasan yang disarikan dari perbandingan kalimat demi kalimat yang tersusun berturut dalam bentuk surat, dilengkapi dengan hasil sketsa pelukis Bramasto (Alfian, 2013).
5. Mengetahui adanya tindakan "pembersihan" atas simpatisan dan anggota PKI pada 27 Oktober 1965 ketika Presiden Soekarno berpidato di depan Pantjatunggal (lima

pemimpin daerah: gubernur, panglima kodam, kepalam polisi, jaksa, dan ketua DPRD) yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia, Presiden Soekarno dengan perasaan marah mengecam tindakan tersebut dengan mengatakan:

"...Revolusi kita bukan revolusi *burgelijk*. Revolusi kita adalah revolusi rakyat yang perutnya tertindas. Dan rakyat yang perutnya tertindas, materialnya pasti juga tertindas, tidak bisa lain mereka pasti berangan-angan sosialisme..., pidato Presiden Soekarno pada tanggal 8 Desember 1965, "...jenazah-jenazah Pemuda Rakjat, BTI, orang-orang PKI, atau simpatisan PKI disembelih, dibunuh, kemudian mayatnya dibiarkan begitu saja tergeletak di pinggir jalan, di bawah pohon, atau dihanyutkan ke sungai dan tidak ada yang mengurusnya sama sekali..."

6. Ketika Mayjend. Soeharto membubarkan PKI dengan Supersemar terhitung pada tanggal 12 Maret 1966. Presiden Soekarno sangat marah dan mengatakan kepada utusan Letjend. Soeharto yakni: Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat:

Pelaksanaan yang penting-penting akan minta izin saya. Tetapi membubarkan PKI *is zonder mijn accord gedaan en niet eens mijn besproken*. Pembubaran partai Politik, menurut konstitusi adalah hak prerogatif presiden, *dat weet je wel*, itu tidak bisa *dideleger* dengan Surat Perintah itu. Soeharto bukan Wakil Presiden dan saya tidak uzur. Saya tidak takut membubarkan PKI kalau memang PKI yang memberontak, tapi harus jelas dulu apa itu Gestok (Gerakan Satu Oktober 1965). Yang jelas baru Aidit itu yang *keblinger* (Tim Lembaga Analisis Informasi, 2007).

Jelas ini adalah pembelaan yang sangat nyata walaupun Presiden Soekarno diambang kehilangan kekuasaan dan wibawanya, Presiden Soekarno tetap membela PKI dan marah atas kebijakan Mayjend. Soeharto dengan membubarkan PKI. Padahal Presiden Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin pernah membubarkan Partai Masyumi dan PSI.

Nasakom pernah diterjemahkan PKI sebagai penciptaan keseimbangan antara nasionalis, agama, dan komunis di semua tingkat pemerintahan, DPR, bahkan pimpinan komando tertinggi militer. Angkatan Darat menolak keras permintaan itu. Maka, terjadi perpecahan yang akhirnya bermuara pada pemberontakan G30S/PKI (Majalah Forum Keadilan, 1997).

Keberanian PKI untuk menerjemahkan Nasakom dan mengajukan ke Presiden Soekarno maka menurut penulis itu adalah sebuah kekuatan. Dan itu karena PKI menyadari Presiden Soekarno memberikan ruang terbuka untuk PKI dan memiliki nilai tawar (*bargaining position*). Raillon (1989) mengungkapkan mengapa Presiden Soekarno telah memberikan kesempatan kepada PKI untuk berkembang? Bahwa ada dua jawaban yang saling berkaitan:

1. Presiden Soekarno akhirnya memihak PKI karena partai ini menunjukkan bahwa mereka merupakan pendukung utama Presiden Soekarno.
2. Presiden Soekarno telah membiarkan atau memanipulir PKI sampai terjadinya Peristiwa Gestapu dengan seluruh akibatnya, sehingga ketika situasi anarkis timbul, satu-satunya penyelamat bangsa adalah Presiden Soekarno sendiri.

Namun, perhitungan ini gagal karena "Revolusi Manifesto Politik telah melahirkan Lubang Buaya dan terbunuhnya 300.000 orang".

Lalu mengapa Presiden Soekarno tidak pernah membubarkan PKI? Bahkan menurut penulis karena tidak maunya Presiden Soekarno membubarkan PKI membawa beliau dalam kejatuhan politik. Mengenai alasan Bung Karno tidak membubarkan PKI berikut jawaban Presiden Soekarno saat diwawancarai oleh A. Dahlan Ranuwihardjo:

Bung Karno punya alasan, "Sekarang ini kita baru dalam tahap revolusi antiimperialis. PKI adalah salah satu kekuatan antiimperialis, mengapa PKI mesti dibubarkan? Saya debat lagi, "Tapi, pak, PKI itu kan menuju ke masyarakat Marxisme-Leninisme kita menuju Pancasila.". Kata Bung Karno, "itu soal nanti Dahlan, kalau dunia ini sudah bebas imperialisme, membentuk dunia baru, *nah* kita akan membentuk masyarakat Pancasila. Di situ nanti akan menyelesaikan soal PKI. Dan sementara ini, saya bisa mengarahkan PKI pada garis Indonesia, bukan garis Komunisme Internasional." Saya debat lagi, "Apa betul pak?" Rupanya saking jengkel betul Bung Karno bilang, "Dahlan, kamu percaya *nggaksaya* bisa mengendalikan PKI?" (Alfian, 2013).

Akhirnya, TAP MPRS No. XXV/1966 menjadi dasar mengakhiri riwayat PKI pada tahun 1966, eksistensi partai dilarang di Indonesia. Seiring dengan ketetapan tersebut, maka dilakukan pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, adanya larangan setiap aktivitas untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2017). Badan Intelijen Amerika Serikat yakni CIA menuliskan bahwa "*After an abortive coup in 1965 by alleged communist sympathizers, SOEKARNO was gradually eased from power*" jika diterjemahkan secara bebas maka "Setelah kudeta yang gagal pada tahun 1965 oleh orang yang diduga simpatisan komunis, SOEKARNO secara bertahap dilengserkan dari kekuasaan" (Central Intelligence Agency, 2021). Pernyataan tersebut terasa janggal karena Peristiwa 30 September 1965 disebutkan sebagai kudeta oleh PKI namun mengalami kegagalan, akan tetapi Soekarno sebagai presiden tetap dilengserkan secara bertahap (kudeta merangkak) (Wardaya, 2007). Pertanyaannya adalah oleh siapa Soekarno dilengserkan? Karena kudeta yang (mungkin) dilakukan PKI telah mengalami kegagalan, seharusnya Soekarno tetap berkuasa.

Asing Memanfaatkan Persaingan Segitiga Politik

Rendahnya legitimasi, sulitnya penyatuan serta perbedaan-perbedaan yang dimiliki, telah memancing asing untuk ikut campur tangan. Campur tangan asing sebagai penyebab adanya konflik atau setidaknya-tidaknya memperparah konflik yang sudah ada. Wujud dari campur tangan asing ada tiga yang biasa terjadi di Timur Tengah: Intervensi (mengganggu kedaulatan negara), Invasi (Penyerangan), dan Okupasi (Pendudukan) (Setiawati &

Permata, 2019). Dokumen-dokumen yang diperiksa oleh Ragna Boden mengungkapkan bahwa Soviet dan sekutu Jerman Timur mereka tidak siap, meskipun informasi yang mereka dapatkan dari PKI pada paruh pertama tahun 1965, dan bahwa mereka tidak punya rencana bagaimana menghadapi situasi G30S 1965. Sementara pengaruh dari China dan Amerika Serikat tetap terbuka sampai batas tertentu, Moskow kemungkinan besar tidak memiliki bagian aktif dalam kudeta di Indonesia. Melalui bantuan Asing (AS) TNI AD berhasil memprovokasi untuk terjadinya Gestapu, melenyapkan saingannya di pusat tentara, sehingga membuka jalan untuk menghilangkan hak sipil kelompok kiri, dan akhirnya munculnya sistem politik baru yaitu pembentukan kediktatoran militer (Bovensiepen, 2019). Gestapu, dengan kata lain, hanyalah fase pertama dari kudeta sayap kanan (TNI-AD) dari tiga fase yang ada (Scott, 1985; Boden, 2007). Hearman (2017) mengungkapkan Setengah juta anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi massanya dibunuh dan ratusan ribu ditahan, kebanyakan tanpa pengadilan.

Ebon (1963) menjelaskan dalam artikel yang ditulis oleh Aidit menegaskan bahwa "Amerika Serikat dan Belanda bersedia menyelesaikan masalah Irian Barat secara damai karena mereka berharap dapat merebut kepentingan mereka melalui praktik neo-kolonialisme." Dia menambahkan: "Belanda rindu untuk menghidupkan kembali hubungan normal dengan Indonesia sesegera mungkin, sehingga mereka dapat mengeksploitasi sumber daya alam dan orang-orang Indonesia melalui jalur normal." Sebelum Gestapu, sejumlah akademisi dan intelektual kebijakan AS yang memiliki koneksi ke CIA dan RAND Corporation secara terbuka mendesak kontak mereka di Angkatan Darat Indonesia "untuk menyerang, menyapu bersih rumah mereka" yang dimaksudkan adalah ancaman PKI dan usaha untuk memperlancar kepentingan ekonomi dan politik AS, Soekarno dianggap penghambat dan gangguan (Scott, 2015a). Tetapi pada tahun 1961 para agen CIA di Washington menjadi pesimis dengan Nasution sebagai sumber daya yang dapat diharapkan, karena "catatannya yang konsisten menyerah kepada Soekarno dalam beberapa hal penting." Relasi antara Nasution dan Soeharto juga sempat dingin, karena Nasution menyelidiki Soeharto atas dugaan korupsi pada tahun 1959, dan memindahkannya dari komandonya (Scott, 2015b).

TNI-AD bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mengadakan partnership kerjasama untuk mendesak Soekarno bertanggung jawab atas peristiwa G30S 1965 (Hasudungan, 2020). Pemerintah AS kemungkinan tidak memainkan peran langsung dalam G-30-S, pemupukan hubungannya dengan Angkatan Darat Indonesia untuk melawan komunisme di Indonesia memungkinkan Angkatan Darat untuk melakukan kekejaman 1965-66. Selanjutnya, Amerika Serikat tidak berusaha untuk menghentikan atau bahkan mengkritik

tindakan tersebut (Harsha, 2019).

KESIMPULAN

Masa sekarang adalah akibat dari masa lalu. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang terjadi tiba-tiba, peristiwa sebelumnya dapat menjadi benang merah untuk melihatnya secara komprehensif. Dengan menganalisis relasi-kekuasaan dan dinamika di antara Soekarno, TNI-AD, Partai Komunis Indonesia selama masa Demokrasi Terpimpin serta kondisi politik global yang memanas karena persaingan Blok Timur (komunisme) dan Blok Barat (kapitalisme/liberalisme) dapat menjadi alternatif dalam menafsirkan peristiwa G30S 1965. Kemudian, asing yang mampu memanfaatkan kondisi tersebut guna mewujudkan kepentingan ekonomi-politik di Indonesia mengantarkan penulis pada kesimpulan bahwa Peristiwa 30 September 1965 adalah klimaks dari persaingan segitiga politik Soekarno, TNI-AD, PKI yang dimenangi oleh TNI-AD yang dibantu asing serta mengantarkan Indonesia pada rezim baru; militer-otoriter dan masuknya investasi asing.

REFERENSI

- Adam, A. W. (2018). Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965. *Archipel*, 95, 11–30. <https://doi.org/10.4000/archipel.604>
- Adnan, S. A. (2016, August 18). Cinta Sang Proklamator. *Medcom.Id*. <https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/xkE8a7Db-cinta-sang-proklamator>
- Alfian, M. A. (2013). *HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) 1963-1966 Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara*. Penerbit Buku Kompas.
- Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI : Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 23. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776>
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2017). *GUIDE KHAZANAH ARSIP ORGANISASI POLITIK - ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORPOL - ORMAS)*. <https://anri.go.id/download/guide-khazanah-arsip-orpolormas-1586222534>
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2019). *Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955*. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). <https://www.anri.go.id/download/naskah-sumber-arsip-seri-pemilu-1955-1586396598>
- Bandyopadhyaya, K. (1977). The Indonesian Economy in Transition: From Guided Economy to New Order. *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 33(4), 432–453. <https://doi.org/10.1177/097492847703300404>
- Bar-Siman-Tov, Y. (1984). The Strategy of War by Proxy. *Cooperation and Conflict*, 19(4), 263–273. <https://doi.org/10.1177/001083678401900405>

- Boden, R. (2007). The "Gestapu" events of 1965 in Indonesia: New evidence from Russian and German archives. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 163(4), 507–528. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003693>
- Bovensiepen, J. M. (2019). SOUTHEAST ASIA PROGRAM PUBLICATIONS. Cornell University. In *The Land of Gold* (Vol. 2, Issue 2, pp. 201–204). Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501725920-014>
- Brewer, W. M. (1951). Louis Gottschalk, Understanding History, a Primer of Historical Method. *The Journal of Negro History*, 36(2), 203–205. <https://doi.org/10.2307/2715419>
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama. http://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/Miriam_Budiardjo_Dasar-Dasar_Ilmu_Politikz-lib.org_.pdf
- Central Intelligence Agency. (2021). *Indonesia - The World Factbook*. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/>
- Crouch, H. (1999). *Militer dan Politik di Indonesia*. Sinar Harapan.
- Ebon, M. (1963). Indonesian Communism: From Failure to Success. *The Review of Politics*, 25(1), 91–109. <http://www.jstor.org/stable/1405832>
- Elson, R. E. (2009). Another Look at the Jakarta Charter Controversy of 1945. *Indonesia*, 88, 105–130. <http://www.jstor.org/stable/40376487>
- Fakih, F. (2013). Institutional Reforms of the Guided Democracy (1957-1965). *Lembaran Sejarah*, 10(1), 96–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23656>
- Fakih, F. (2020). Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period. In *Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period*. BRILL. <https://doi.org/10.1163/9789004437722>
- Feith, H. (1964). President Soekarno, the Army and the Communists: The Triangle Changes Shape. *Asian Survey*, 4(8), 969–980. <https://doi.org/10.2307/2642634>
- Harsha, S. (2019, March 4). An American library in 1965 Indonesia: From enlightenment to torture. *Strategic Review By SGPP Indonesia*. <http://sr.sgpp.ac.id/post/an-american-library-in-1965-indonesia-from-enlightenment-to-torture>
- Hasudungan, A. N. (2020). TNI-AD dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dalam Kelengseran Soekarno Tahun 1965-1968. *Yupa: Historical Studies Journal*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.30872/yupa.v3i1.173>
- Hearman, V. (2017). Contesting Victimhood in the Indonesian Anti-Communist Violence and Its Implications for Justice for the Victims of the 1968 South Blitar Trisula Operation in East Java. *Journal of Genocide Research*, 19(4), 512–529. <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393943>
- Jones, H. P. (1971). *Indonesia : the possible dream*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Kadi, S. (2000). *TNI-AD Dahulu, Sekarang dan Masa Depan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (1999). *Tentara Mendamba Mitra*. PPW-LIPI & Mizan Pustaka.

- Lubis, I., & Hasudungan, A. N. (2022). Yamin's sociocultural and mythical creation of colonized Indonesia by the Dutch for 350 years. *Malala*, 10(13), 38–55. <https://doi.org/10.11606/issn.2446-5240.malala.2022.195498>
- Majalah Forum Keadilan. (1996, July). *Majalah Hukum dan Demokrasi "Forum Keadilan" No.8 Tahun V*.
- Majalah Forum Keadilan. (1997, June). Tokoh Indonesia Masa Depan. *Majalah Forum Keadilan*.
- Mortimer, R., & Santosa, Y. (2011). *Indonesian communism under sukarno ideologi dan politik 1959-1965*. Pustaka Pelajar.
- Notosusanto, N., & Saleh, I. (1989). *Tragedi Nasional percobaan KUP G 30S/PKI di Indonesia*. Intermedia.
- Pour, J. (2010). *Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan dan Petualang*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Raillon, F. (1989). *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974*. LP3ES.
- Sanusi, A. (2018). SIKAP DAN KEBIJAKSANAAN SOEKARNO TERHADAP ISLAM PASCA KEMERDEKAAN. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 6(2), 31–60. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i2.3520>
- Scott, P. D. (1985). The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967. *Pacific Affairs*, 58(2), 239. <https://doi.org/10.2307/2758262>
- Scott, P. D. (2015a). Still Uninvestigated After 50 Years: Did the U.S. Help Incite the 1965 Indonesia Massacre? *The Asia-Pacific Journal | Japan Focus*, 13(31), 1–17. <https://apjif.org/2015/13/31/Peter-Dale-Scott/4351.html>
- Scott, P. D. (2015b). Still Uninvestigated After 50 Years: Did the U.S. Help Incite the 1965 Indonesia Massacre? *The Asia-Pacific Journal | Japan Focus*, 13(31), 1–17.
- Setiawati, Siti M., & Permata, A. N. (2019). *PROXY WAR DAN KONTESTASI KEKUATAN DALAM KONFLIK REGIONAL DI TIMUR TENGAH*. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/hasil_diskusi/hasil-diskusi-40.pdf
- Starner, F. L. (2021). Review of The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, by H. Feith. *Journal of Southeast Asian History*, 5(2), 220–224. <http://www.jstor.org/stable/20067520>
- Sulastomo. (2008). *Hari-hari yang Panjang, Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar*. Penerbit Buku Kompas.
- Tim Lembaga Analisis Informasi. (2007). *Kontroversi Supersemar dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto, edisi Revisi*. Media Pressindo.
- Utama, A. (2017, October 18). Dokumen rahasia AS soal Peristiwa 1965 diungkap, TNI "tak akan ubah sejarah." *BBC Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41632433>
- Utami, N. A. (2018). *Peranan Kerjasama Indonesia–Korea Selatan Bagi Pembangunan Industri Pertahanan di Indonesia* [Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/41850/>

- van der Kroef, J. M. (1957). "Guided Democracy" in Indonesia. *Far Eastern Survey*, 26(8), 113–124. <https://doi.org/10.2307/3024455>
- Wardaya, B. T. (2007). *Membongkar Supersemar!: dari CIA hingga kudeta merangkak melawan Bung Karno*. Galang Press.
- Weiner, T. (2008). *Membongkar Kegagalan CIA - Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya*. PT Gramedia Pustaka Utama.